

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA

Arief Dwi Yanuar; Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si.
Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, serta memaparkan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam pada guru Pendidikan Pancasila, wakil kepala sekolah bidang Al-Islam Kemuhammadiyah, serta siswa, dan dokumentasi. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berperan penting dalam mengimplementasikan nilai demokrasi yang mencakup pemahaman nilai kesetaraan tanpa diskriminasi, optimalisasi peran guru sebagai fasilitator yang memberikan ruang berpendapat serta *reward* apresiasi, hingga penerapan nilai demokrasi di lingkungan sekolah melalui metode kelompok yang melatih toleransi, gotong royong, dan wawasan nusantara. Pelaksanaan pendidikan demokrasi menghadapi kendala berupa kendala psikologis-partisipatif (siswa masih ragu mengemukakan pendapat secara mandiri, kurang percaya diri, dan cenderung menjadi *follower* suara mayoritas), serta kendala habituasi nilai di mana siswa masih bergantung pada instruksi final guru dalam pengambilan keputusan. Pihak sekolah dan guru berhasil mengatasinya melalui penguatan stimulasi berkelanjutan berupa metode *Project Based Learning* (PjBL) dan studi kasus (*case study*) isu-isu viral, perluasan sistem habituasi melalui pembuatan "Kesepakatan Kelas" secara kolektif di awal semester, serta penyediaan fasilitas ruang publik yang aman seperti kotak saran sekolah. Kegiatan pembelajaran ini terbukti efektif mengintegrasikan aspek keteladanan guru dan kenyamanan psikologis siswa guna mentransformasikan nilai abstrak Pancasila menjadi kultur sekolah yang hidup serta selaras dengan etika Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Kata kunci: Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Pancasila, Pendekatan Inklusif.

Abstract

This study aims to describe the implementation of democratic education through Pancasila Education instruction at SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, examine the challenges faced during this process, and outline the solutions applied to overcome them. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through field observations, in-depth interviews with Pancasila Education teachers, the vice-principal for Al-Islam and Kemuhammadiyah affairs, and students, as well as through document analysis. The data were analyzed using an interactive model

comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Pancasila Education plays a pivotal role in implementing democratic values—ranging from understanding equality and non-discrimination to optimizing the teacher's role as a facilitator who encourages independent expression and offers appreciative rewards. Furthermore, democratic values are applied within the school environment through group-based methods that foster tolerance, mutual cooperation (gotong royong), and a national perspective (wawasan nusantara). However, the implementation of democratic education faces challenges, specifically psychological-participatory issues (students remain hesitant to express independent opinions, lack self-confidence, and tend to follow the majority view) and difficulties in habituating values (students still rely on the teacher's final instructions for decision-making). The school and teachers successfully addressed these issues by providing continuous stimulation through Project-Based Learning (PjBL) and case studies on trending issues, expanding habituation practices through the collective creation of "Class Agreements" at the start of the semester, and providing safe avenues for expression, such as a school suggestion box. These instructional activities proved effective in integrating the teacher's role as a role model with student psychological comfort, thereby transforming the abstract values of Pancasila into a vibrant school culture aligned with Al-Islam and Kemuhammadiyah ethics.

Keywords: Democratic Education, Pancasila Education, Inclusive Approach.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan unsur esensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sepanjang hayat, mulai dari lingkungan keluarga (informal), sekolah (formal), hingga masyarakat (non-formal). Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh, mandiri, bermakna bagi lingkungannya, serta memberikan kontribusi strategis terhadap kemajuan suatu bangsa dan pembangunan watak bangsa. Secara teoretis, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar manusia dewasa dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta pandangan hidup kepada generasi muda agar menjadi individu yang bertanggung jawab sesuai sifat hakiki kemanusiaannya (Jalaluddin dan Idi, 2018). Keberhasilan aktivitas ini tidak terlepas dari keterikatan enam unsur esensial pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, metode, dan lingkungan (Achmad, 2004).

Dunia pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap kompleksitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kondisi ini mengharuskan para pendidik untuk mampu merancang, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya menarik, kreatif, dan inovatif, melainkan juga integratif dalam menanamkan nilai-nilai karakter dasar kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan mandat Tujuan Pendidikan Nasional untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan (Hidayat dan Abdillah, 2019).

Demokrasi menjadi salah satu konsep kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang fundamental untuk diinternalisasikan sejak dini. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratein/cratos* (kekuasaan) yang bermakna sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Ubaidillah dan Rozak, 2008 dan Yuliana, 2019). Menurut Hans Kelsen, demokrasi merupakan proses berkelanjutan menuju kesempurnaan yang berakar dari prinsip penentuan kehendak sendiri atas dasar ide kebebasan (Thalhah, 2009). Mewujudkan masyarakat yang demokratis atau dalam khasanah Indonesia disebut sebagai masyarakat madani memerlukan penanaman kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan demokrasi di lingkungan formal menjadi instrumen strategis untuk melatih generasi muda agar tidak sekadar memahami demokrasi sebagai teori struktural, tetapi mampu mengubah nilai-nilai abstrak tersebut menjadi kultur nyata yang hidup, kritis, dan beradab. Melalui pandangan John Dewey, pendidikan demokrasi ini diposisikan sebagai proses pendidikan yang menekankan pada pengalaman langsung dalam kehidupan sosial peserta didik.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila memegang posisi multidimensional sebagai sarana utama pendidikan moral sekaligus laboratorium penanaman nilai-nilai demokrasi yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Sebagai studi kehidupan keseharian, mata pelajaran ini memiliki tugas pokok untuk membentuk moral, nilai, dan kaidah secara menyeluruh dan seimbang demi mencetak warga negara yang baik, tahu, dan sadar akan hak dan kewajibannya (Aji, 2013). Lebih jauh, Pendidikan Pancasila berfungsi menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional (Magdalena dkk., 2020). Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, siswa diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai musyawarah (*syura*), toleransi, gotong royong, serta wawasan nusantara sebagai fondasi kebersamaan. Integrasi nilai moral Pancasila ini sangat tepat diimplementasikan dalam membentuk karakter akhlak generasi muda (Juliardi, 2015).

Efektivitas internalisasi nilai demokrasi ini sangat bergantung pada bagaimana guru memformulasikan iklim kelas. Guru dituntut menggunakan metode pembelajaran yang

berpusat pada siswa (*student-centered*), seperti *Project Based Learning* (PjBL) atau studi kasus (*Case Study*), agar peserta didik dipandang sebagai subjek aktif yang bebas berpartisipasi dan mengemukakan pendapat tanpa diskriminasi. Variasi strategi inovatif selain ceramah seperti *inquiry*, ekspositori, kooperatif, maupun kontekstual sangat dibutuhkan agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa (Wandini dkk., 2022). Di samping itu, performa guru di kelas memegang peranan vital karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sehingga mampu menjadi *role model* atau panutan yang memberikan dampak positif bagi masa depan siswa.

Implementasi pendidikan demokrasi di lapangan masih kerap menemui berbagai kendala nyata. Berdasarkan hasil pengamatan, kendala tersebut meliputi aspek psikologis partisipatif, di mana siswa seringkali masih ragu, kurang percaya diri, serta cenderung menjadi pengikut (*follower*) suara mayoritas dalam pengambilan keputusan kelas. Kesenjangan partisipasi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual serta variasi kemampuan antar siswa yang tidak terhindarkan di ruang kelas (Nur dan Sudarsono, 2018). Selain itu, terdapat kendala habituasi nilai yang tecermin dari belum optimalnya internalisasi prinsip kesetaraan dan kuatnya ketergantungan siswa pada instruksi final guru saat dialog kelompok dilangsungkan. Kesenjangan antara idealisme kurikulum Pendidikan Pancasila dalam melahirkan warga negara yang kritis-partisipatif dengan realitas hambatan sosiokultural di ruang kelas ini menjadi latar belakang penting yang mendasari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada tahun 2026. Sekolah ini dipilih sebagai lokus penelitian untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana proses internalisasi nilai demokrasi diintegrasikan dalam ekosistem sekolah formal, mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang dihadapi oleh siswa dan guru di lapangan, serta mengeksplorasi solusi praktis yang diterapkan guna mengatasi hambatan tersebut. Kajian kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat memberikan deskripsi empiris berharga mengenai upaya mentransformasikan nilai Pancasila menjadi budaya hidup (*living values*) yang bernafaskan etika Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila secara alami di lapangan. Melalui desain deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai realitas kompleks di balik interaksi guru dan siswa serta memaknai fenomena yang muncul berdasarkan sudut pandang partisipan selama proses pembelajaran Pendidikan Pancasila berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, khususnya pada lingkup pembelajaran kelas VII Tahfidz dan kelas VIII Tahfidz. Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung mulai dari bulan September 2025 sampai Februari 2026. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Adapun subjek penelitiannya ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang meliputi Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd. selaku guru Pendidikan Pancasila, Kepala Sekolah, serta perwakilan siswa kelas VII dan VIII Tahfidz, di antaranya Pratama Budy Saputra, Sekar Nana Aminah, Khansa Maredyasta P. A., dan Asiah Qonita Zahra.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di dalam kelas untuk mengamati situasi dan kondisi nyata mengenai internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung dengan para informan guna mendapatkan informasi serta perspektif subjek yang mendalam terkait fokus masalah. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang mencakup profil sekolah, visi misi, struktur organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi proses pengecekan data dari berbagai sumber dan metode. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari komponen pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa, mengeksplorasi berbagai kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa, serta mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Pembahasan ini dipaparkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini. Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura menunjukkan hasil yang positif dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan partisipatif. Guru dan pihak sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendidikan demokrasi sebagai sarana membentuk peserta didik yang kritis, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai demokrasi diinternalisasikan melalui pembelajaran non-diskriminatif, pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk menyampaikan pendapat, serta pembiasaan musyawarah dan kerja sama dalam kegiatan pembelajaran.

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, seperti diskusi kelompok, penyusunan kesepakatan kelas, dan kegiatan mengemukakan pendapat yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menghargai perbedaan dan mencapai mufakat. Pembiasaan tersebut diperkuat melalui kegiatan kesiswaan, seperti pemilihan pengurus kelas dan agenda tahunan "Pesta Demokrasi" dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Temuan ini sejalan dengan penelitian Wadham dkk. (2024) dan Maryam dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi akan lebih efektif apabila diintegrasikan dalam praktik pedagogis dan aktivitas pembelajaran yang partisipatif.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan demokrasi masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian siswa masih menunjukkan keraguan untuk menyampaikan pendapat secara mandiri, kurang percaya diri, dan cenderung mengikuti pendapat mayoritas tanpa melakukan telaah secara kritis. Selain itu, masih terdapat ketergantungan siswa terhadap arahan guru dalam pengambilan keputusan dan adanya tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan etika serta nilai-nilai religius di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur dan Sudarsono (2018) yang menjelaskan bahwa perbedaan karakter dan

kemampuan siswa dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan partisipasi yang merata di kelas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, sekolah dan guru menerapkan beberapa strategi, di antaranya penggunaan metode Project Based Learning (PjBL), diskusi berbasis studi kasus terhadap isu-isu aktual, serta pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif. Selain itu, sekolah memperkuat budaya demokrasi melalui penyusunan kesepakatan kelas secara kolektif dan penyediaan kotak saran sebagai media penyaluran aspirasi siswa. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberanian siswa dalam berpendapat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menciptakan budaya demokrasi yang inklusif, aman, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rini (2017), Sayektiningsih dkk. (2017), dan Laksono (2017) yang menegaskan bahwa pembelajaran partisipatif dan pembiasaan budaya demokratis di sekolah berperan penting dalam membentuk karakter demokratis peserta didik.

4. PENUTUP

Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan karakter inklusif dan partisipatif pada diri siswa. Guru secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai demokratis, seperti kebebasan berpendapat dan persamaan hak, mulai dari tahap perencanaan pembelajaran hingga pembiasaan di dalam kelas. Integrasi ini tidak hanya mempermudah pemahaman konsep yang abstrak mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui metode diskusi kelompok yang toleran, tetapi juga melatih siswa untuk berani berbicara, menghargai perbedaan pendapat, serta memahami esensi musyawarah demi kepentingan bersama. Dengan mengadopsi pendekatan konseptual berbasis penguatan wawasan nusantara serta keterlibatan aktif dalam program kesiswaan seperti "Pesta Demokrasi" (pemilihan ketua IPM), nilai-nilai Pancasila menjadi lebih melekat dan mewujudkan secara konkret dalam kultur sekolah sehari-hari.

Penerapan strategi ini menghadapi kendala nyata berupa adanya jarak antara pemahaman teori di buku teks dan praktik sosial di lapangan, di mana sebagian siswa masih mengalami ego individual serta rasa canggung untuk menegakkan prinsip kesetaraan secara mandiri. Terdapat pula hambatan berupa penggunaan bahasa dalam buku teks yang dirasakan

terlalu berat oleh siswa, serta kendala berupa sikap keras kepala dari oknum siswa tertentu saat proses diskusi kelompok berlangsung. Untuk mengatasi hal tersebut, guru menerapkan solusi berupa pemberian stimulasi berkelanjutan, pemanfaatan media digital interaktif, serta pemberian contoh atau keteladanan (*role modeling*) secara langsung guna menyederhanakan bahasa teks. Pihak sekolah dan guru juga mengupayakan lingkungan yang kondusif melalui metode pembagian kelompok secara acak, penyediaan wadah transparansi berupa kotak saran, serta penguatan adab bermuamalah agar kebebasan berekspresi siswa tetap berjalan efektif dan selaras dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2004). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES PRESS.
- Aji, S. (2013). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Jalaluddin, & Idi, A. (2018). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan* (7th ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Juliardi, B. (2015). "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 2(2), 119–126. <https://doi.org/10.36706/jbti.v2i2.4581>.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang". *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Laksono, B. A. (2017). "Peran Pendidikan Nonformal dalam Menumbuhkan Karakter Demokratis". *Seminar Nasional Pendidikan: Sinergitas Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Penguatan Pendidikan Karakter*, 111–119.
- Maryam, S., Nuswantari, N., & Kokotiasa, W. (2022). "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi pada Mata Pelajaran PKn dalam Pembentukan Karakter Demokratis Siswa Kelas 8 SMP Negeri 11 Madiun". *Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora (Senassdra)*, 1(1), 538–546.
- Nur, S., & Sudarsono. (2018). "Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS: Study Kasus SMA Negeri 6 Takalar". *Journal Sociology of Education*, 6(1), 95–103.
- Rini, N. D. A. (2017). "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan". *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(3), 164–168.
- Sayektiningsih, S., Sumardjoko, B., & Muhibbin, A. (2017). "Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Klaten". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 228–236.
- Thalhah, H. (2009). "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413–422. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>
- Ubaidillah, & Rozak, A. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi Hak Asasi*

- Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Rencana Prenada Media Group.
- Wadham, R. L., Christensen, L., & Leary, H. (2024). "Democratic Education as Expressed in Practice: An Integrative Literature Review". *Journal of Educational Research & Practice*, 14(1), 119–134. <https://doi.org/10.5590/JERAP.2024.14.1.08>.
- Wandini, R. R., Sipahutar, D. A., Rahmawati, I., Diah, R., & Harpani, S. (2022). "Merubah Pandangan Siswa yang Menganggap Pembelajaran PKn Membosankan menjadi Pembelajaran PKn yang Menyenangkan". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 1489–1496. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5557>
- Yuliana, R. (2019). "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Smp Negeri 3 Gringsing Batang". *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 17–29.

